



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUHARTO BUDIYONO**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **456216**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 581.596.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m²/36 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 681 m²/96 m² di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 308.960.000
3. Tanah Seluas 398 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 32.636.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 204.250.000

1. LAINNYA, GAZZELE TIPE 10 Tahun 1960, HASIL SENDIRI Rp. 27.250.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX155 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA AVANZA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. LAINNYA, SEPEDA TREK EMONDA SL 5 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 415.082.651**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.212.928.651

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.212.928.651



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.